GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

17. Qanun..../3

17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12);
18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 09);
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 83);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Renstra SKPA Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.
(2) Renstra SKPA Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman SKPA dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA).

Pasal 2

(1) Renstra SKPA Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Renstra SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh sebagai berikut :
    a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
    b. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
    c. Dinas Pangan Aceh;
    d. Dinas Peternakan Aceh;
    e. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
    f. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;

g. Dinas..../4

g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
i. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh;
j. Biro Perekonomian Setda Aceh;
k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
l. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh;
m. Sekretariat Baitul Mal Aceh;
n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
p. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;
q. Dinas Pengairan Aceh;
r. Dinas Perhubungan Aceh;
s. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
t. Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
u. Biro Adminisitrasi Pembangunan Setda Aceh;
v. Dinas Pertanahan Aceh;
w. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh;
x. Dinas Pendidikan Aceh;
y. Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
z. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh;
aa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
bb. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;
cc. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh;
dd. Biro Umum Setda Aceh;
ee. Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan;
ff. Badan Penghubung Pemerintah Aceh;
gg. Badan Kepegawaian Aceh;
hh. Dinas Syariat Islam Aceh;
ii. Sekretariat Daerah Aceh;
jj. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
kk. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;
ll. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
mm. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;
nn. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;
oo. Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
pp. Dinas Kesehatan Aceh;
qq. Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Aceh;
rr. Rumah Sakit Jiwa Aceh;
ss. Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh;
tt. Dinas Sosial Aceh;
uu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
vv. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh;
ww. Sekretariat DPR Aceh;

xx. Biro Tata..../5

xx. Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh;
yy. Biro Hukum Setda Aceh;
zz. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Aceh;
aaa. Biro Organisasi Setda Aceh;
bbb. Inspektorat Aceh;
ccc. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
ddd. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh; dan
eee. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

(2) Renstra SKPA Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 September 2019
16 Muharram 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 September 2019
17 Muharram 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 75